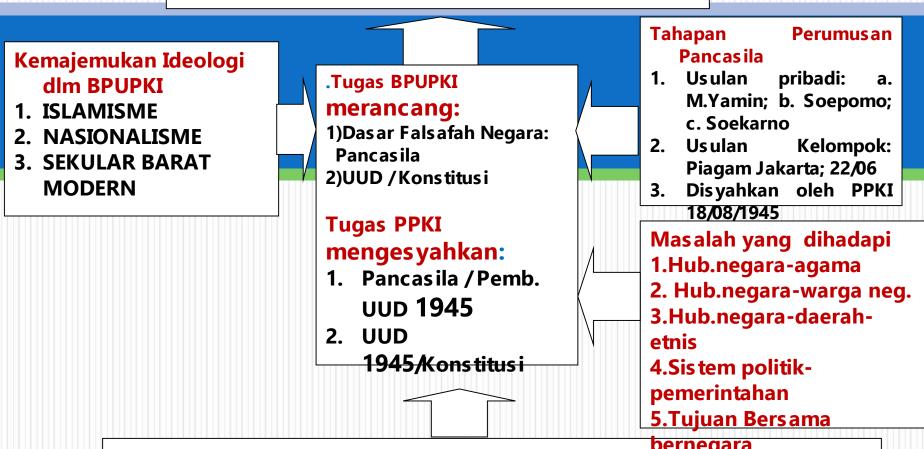
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NKRI Sutarjo ADISUSILO, J.R.



KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA dalam: 1. agama; 2. etnis - kesukuan; 3. kebudayaan; 4. adat istiadat; 5. bahasa; 6. sosial; 7. politik; 8. pendidikan; 9. geografis, 10. ekonomis; dll.

SEJUMLAH PERTANYAAN-PERSOALAN TERKAIT TOPIK DI ATAS

- 1. Seperti apa situasi umum keadaan masyarakat Nusantara menjelang kelahiran Pancasila
- 2. Siapa anggota BPUPKI-PPKI? Siapa yang membentuknya? Apa tugasnya? Apa hasilnya
- 3. Latar belakang apa yang paling mempengaruhi jalan pikiran, pandangan dan sikap para anggota BPUPKI-PPKI tentang dasar falsafah negara?
- 4. Pancasila yang mana yang berlaku di Indonesia?
 Siapa perumusnya? Pancasila sebagai consensus bangsa, apa makna dan dampaknya?
- 5. Apa keistimewaan Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara?
- 6. dll

1. Situasi-Gambaran Umum Masyarakat Nusantara [Indonesia] pra Pancasila

 Gambaran kehidupan suatu masyarakat dapat mencerminkan dan mempengaruhi pandangan hidup,pola piker dan tingkah laku dari masyarakat yang bersangkutan.
 Pancasila merupakan representasi dari pandangan hidup, pola piker dan tingkah laku bangsa Indonesia yang serba majemuk.

Masyarkat Indonesia yang serba majemuk / pluraris nampak dlm

- 1.Agama. Di Nusantara ini ada agama Islam;Hindu;Budha; Kristen Protestan; Kristen Katolik; Cofusian. Agama mempengaruhi pandangan, pola pikir dan pola tingkah laku manusia.
- 2. E tnis kesukuan Ada lebih 350 suku besar. Mis. Aceh; Batak; Minang; Melayu; Dayak; Sunda; Jawa; Bali; Bugis; Ambon; dll;
- 3. Geografis . Nusantara adalah sebuah kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 1750 pulau besar-kecil terbentang dari Sabang-Merauke
- 5. Bahasa : lebih 375 bahasa daerah yang tersebar di Nusantara
- 6. Ratusan kebudayaan; 7. Ratusan adat istiadat; 6. Sistem sosial; 8. Sistem politik; 9. Sistem pendidikan;, 10. sistem ekonomis; dll.

INTINYA INDONESIA INI SERBA MAJEMUK, dan kemajemukan itu mewarnai pandangan hidup, pola pikir, pola tingkah laku. Hebatnya Pancasila mampu mempersatukan, mengharmoniskan serba kemajemukan itu.

2. Kemajemukan Keanggotaan BPUPKI-PPKI [lihat lampiran keanggotaan BPUPKI]

- Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI [66 orang] sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. 2) Jepang menco agar BPUPKI mempresentasikan keadaan seluruh warga Nusantara saat itu dengan memperimbangkan:
- 1. Pendidikan: keragaman sistem Pendidikan saat itu. Anggota BPUPKI ada yang: alumni pondok pesantren [mis. KH. Mansyur; Whahid Hashim]; alumni PT di Hindia Belanda; [Mis. Ir. Soekarno;]; alumni PT Eropa [mis. Drs. M. Hatta]
- 2. Agama [mayorittas Muslim; ada yang Kristen; ada Katolik; ada yang Budha; ada yang Hindu; ada yang Confusian]
- 3. Status social: ada yang bangsawan seperti GBH Radjiman Werdodiningrat; Ir. Sukarno; ada yang rakyat jelata seperti Hatta; Yamin, ada yang pegawai pemerintah; ada yang swasta; dll.
- 4. Kesukuan, ada Jawa; Minang; Menado; Ambon; Cina,dll
- 5. Asal-budaya-suku: Jawa; Minang; Menado; Ambon; Cina; dll

3. Kemajemukan ideologi dalam BPUPKI-PPKI

- Anggota BPUPKI yang anggotanya 66 orang itu dapat digolongan dalam 3 ideologi besar:
- 1. Islamisme: ideologi ini didukung terutama para ulama Islam seperti KH.Wachid Hasyim; KH.M.Mansyur; dll.Mereka memperjuangkan negara teokrasi Islam untuk Indonesia, yaitu negara yang berdasarkan agama / syariah Islam
- 2. Nasionalisme ideologi ini didukung terutama tokoh pergerakan nasional , yang mendapat pendidikan tinggi di Hindia Belanda seperti Ir. Soekarno; Mr.M.Yamin, dll.Mereka memperjuangkan negara nasional Indonesia.
- 3, Sekuler Barat Modern: ideologi ini terutama didukung tokoh yang memperoleh Pendidikan tinggi di Eropa, seperti Drs.M.Hatta; Dr. Soepomo;dll. Mereka memperjuangkan negara sekuler modern yang mokratis.
- Catatan: Pandangan ideologi seseorang menentukan orientasi hidup, kepentingan dan tujuan hidup seseorang. Maka Ketika dalam masyarakat ada beberapa ideologi yang berkembang maka betapa sulitnya membentuk ideologi bersama, perlu consensus, perlu kompromi.

4. Tugas BPUPKI-PPKI

- 1. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Jepang di Indonesia dengan tugas <u>merancang</u> 1) Dasar Falsafah Negara [*philoshophiseche grounslaag*] jika Indonesia merdeka]; 2) Konstitusi [UUD}
- 2. PPKI dibentuk oleh para tokoh BPUPKI [mis. Soekarno; M.Hatta, dll] sebagai pengganti BPUPKI yang dianggap bernuansa Jepang. Anggota BPUPKI dan PPKI sama, hanya namanya berbeda. Tugasnya adalah mengesyahkan hasil kerja BPUPKI, 1) rancangan Dasra Falsafah Negara yang berbentuk Mukadimah [yang berisi Pancasila]; 2) UUD;dll.
- Catatan:
- 1. Yang mengikat warga bangsa adalah keputusan hukum [yang disyahkan, bukan rancangan]
- 2, Piagam Jakarta khususnya sila pertama direvisi menjelang sidang PPKI tanggal
 18 Agustus 1945

5. Tahapan perumusan Pancasila

- Pancasila yang berlaku di Indonesia harus melalui beberapa tahapan
- 1. Tahapan usulan perorangan

Pembukaan UUD 1945

- a 29 Mei 1945 Pancasila usulan Yamin; ada usulan Soepomo;
- B. 1 Juni 1945 Pancasila usulan Soekarno [dikenal sebagai hari lahir Pancasila]
- 2. Tahap rancangan Panitia [ada dua panitia yang dibentuk BPUPKI, Panitian 9 [kecil] yang dipimpin Ir.Soekarno dengan tugas merumuskan Dasar Falsafah Negara]. Panitia ini menghasilkan rancangan Mukadimah Negara [Preabel], yang pada tanggal 22 Juni 1945 disetujui BPUPKI dengan nama Piagam Jakarta. Sedangkan panitia yang dipimpin oleh Dr.Soepomo menghasilkan rancangan Konstitusi Negara [UUD].
- 3. Tahap pengesyahan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia oleh PPKI. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai Parlemen sementara Indonesia mengesyahkan rancangan Mukadimah /Pembukaan UUD 1945 yang berintikan Pancasila sebagai Mukadimah Negara Indonesia yang syah dan sebagai Staatsfundamentalnorm, maka Pembukaan UUD 1945 menjadi ketentuan hukum tertinggi di atas Batang Tubuh UUD 1945. Dengan demikian maka Pancasila yang syah berlaku; mengikat seluruh warga negara dan negara Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam

6. PENGESYAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA INDONESIA

Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta, PPKI [*The Founding Fathers of Indonesia*] mengesyahkan :

- 1. Mukadimah/Pembukaan UUD [1945] [yang berisi Pancasila] <u>disyahkan</u> sebagai Staatsfundamentalnorn [Pokok Kaidah Negara yang fundamental], setelah Bung Hatta mendengarkan permintaan dari sejumlah daerah non Muslim, setuju menghapus tujuh [7] kata "<u>dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya</u>", menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa". Ini merupakan rumusan kompromis antara kelompok Islamisme, Nasionalis dan Sekular Barat Modern.
 Kompromi ini dilanjutkan dalam rumusan Pasal 29 (1;2) UUD 1945
- 2. dan Rancangan UUD [1945] <u>disyahkan</u> menjadi UUD]1945] NKRI Maka hanya Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 yang syah berlaku, mengikat seluruh warga bangsa dan NKRI
- 3. Memilih Ir.Soekarno dan Drs. M. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
- 4. Menetapkan PPKI sebagai Lembaga Legislatif sementara.
- DII.

7. Keistimewaan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia

- 1. Pancasila menolak negara berdasarkan agama tertentu / teokrasi
- 2, Pancasila menolak negara berdasarkan komunisme / ateisme
- 3. Pancasila menolak negara berdasarkan sekularisme / liberal sekular
- 4. Tetapi Pancasila mendukung Negara Indonesia yang Berketuhahan yang Maha Esa

Inilah keistimewaan Pancasila

KESIMPULAN

- 1. PANCASILA MERUPAKAN HASIL KONSENSUS / KESEPAKATAN SELURUH WARGA BANGSA INDONESIA YANG SERBA MAJEMUK
- 2. PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH BANGSA DAN NEGARA MENJAMIN PERSATUAN, KESATUAN DAN KEUTUHAN INDONESIA
- 3. PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDEMENTAL NORM [POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL: SEBAGAI SUMBER HUKUM YANG TERTINGGI] TIDAK DAPAT DIGANTI OLEH SIAPAPUN TERMASUK MPR KECUALI OLEH THE FAUNDING FATHERS [SDH MENINGGAL SEMUA]
- 4.PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA PALING MAMPU MENJAMIN TOLERANSI, KEHARMONISAN DAN KERUKUNAN DI INDONESIA YANG SERBA MAJEMUK karena bukan negara agama, bukan negara komunis, bukan negara liberal

Referensi

- Buku:
- 1. Pranarka, A.M.W. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, 1985, Jakarta.
- 2. Saafroedin Bahar [ed], Risalah Sidang BPUPKI-PFKI, Sekretariat Negara RI, 1995, Jakarta
- 3.Sekretariat MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 2013, Jakarta.
- Lampiran :
- 1) Keanggotaan BPUPKI-PPKI
- 2) https://www.youtube.com/watch?v=jalNZLAozss [video pidato Soekarno, 1 Juni 1945]
- 3) https://www.youtube.com/watch?v=YTfOyFUpY [video kerukunan umat beragama]